



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DINAMIKA POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

**Reformasi dan Dilema Transisi Demokrasi
dalam Masyarakat Majemuk**
Nasikun

**Penentuan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
dalam UU Pemilu 2004**
Muhammad Asfar

**Perbedaan Kinerja Bank Sebelum dan Sesudah
*Fit and Proper Test***
Toto Warsoko Pikir

**Implikasi Perseptual Mahasiswa Terhadap Preferensi Mereka
tentang Seorang Pemimpin**
Andria Saptyasari

**Representasi Pemikiran Politik dalam
Drama Indonesia Mutakhir**
I. B. Putera Manuaba

Pemilu dan Pembangunan Politik: Berkaca Kasus Indonesia
Kris Nugroho

**Persepsi Baru:
Bahasa, *Discourse* dan Budaya Rakyat**
Herudjati Purwoko

**Resensi Buku:
Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi**
Herwanto A.M.

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Pengantar Redaksi

Topik utama pada edisi Nomor 1 (Januari) 2004 jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* terfokus pada permasalahan *Dinamika Politik dan Pemilu di Indonesia*. Tema ini sengaja diangkat karena berkaitan dengan hajatan besar bangsa Indonesia yaitu Pemilu. Banyak masyarakat awam maupun pengamat memprediksikan bahwa Pemilu kali ini banyak menemui permasalahan, sebab sosialisasi pada masyarakat sangat minim bahkan kalau bisa dibilang kurang. Tak pelak kecenderungan yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat kurang begitu mengenal calon pilihannya maupun bagaimana mekanisme dan cara pemilihan yang benar, meskipun KPU secara gencar telah mengadakan pengenalan baik melalui media cetak maupun elektronik. Di sisi lain, penilaian keraguan terhadap KPU sebagai lembaga pengawal proses pemilu sampai terpilihnya pemimpin negeri ini ternyata kurang memiliki kesiapan baik dari sisi teknis maupun non teknis.

Beberapa tulisan yang sesuai dengan topik utama edisi kali ini antara lain: penjelasan serta analisa mengenai wajah reformasi dan demokrasi seperti tulisan Nasikun dalam *Reformasi dan Dilema Transisi Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk*, kemudian buah pemikiran Muhammad Asfar dalam *Penentuan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi dalam UU Pemilu 2004*, serta *Pemilu dan Pembangunan Politik: Berkaca Kasus Indonesia* oleh Kris Nugroho. Di luar tema di atas redaksi juga menyajikan artikel mengenai *Perbedaan Kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Fit and Proper Test* yang ditulis Toto Warsoko. *Pikir, Implikasi Perseptual Mahasiswa Terhadap Preferensi Mereka tentang Seorang Pemimpin* oleh Andria Saptyasari. Redaksi juga menyajikan dua kupasan karya sastra modern yang dipaparkan oleh I. B. Putera Manuaba yaitu *Representasi Pemikiran Politik dalam Drama Indonesia Mutakhir dan Persepsi Baru: Bahasa, Discourse dan Budaya Rakyat* oleh Herudjati Purwoko. Sebagai bahan timbangan buku agar melengkapi wacana mengenai pemilu disajikan resensi buku: *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi* yang dirensensi oleh Herwanto A.M.

Akhirnya, semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat, serta menjaga semangat untuk mengawal dan memberi arah demokrasi menjadi lebih baik.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 2 (April) 2004:
Dimensi-Dimensi Otonomi Daerah

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Reformasi dan Dilema Transisi Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk

Nasikun

1

Penentuan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi dalam UU Pemilu 2004

Muhammad Asfar

13

Perbedaan Kinerja Bank Sebelum dan Sesudah *Fit and Proper Test*

Toto Warsoko Pikir

27

Implikasi Perseptual Mahasiswa terhadap Preferensi Mereka tentang Seorang Pemimpin

Andria Saptiyasari

45

Representasi Pemikiran Politik dalam Drama Indonesia Mutakhir

I. B. Putera Manuaba

59

Pemilu dan Pembangunan Politik: Berkaca Kasus Indonesia

Kris Nugroho

71

Persepsi Baru:

Bahasa, *Discourse* dan Budaya Rakyat

Herudjati Purwoko

83

Resensi Buku:

Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi

Herwanto A.M.

95

REPRESENTASI PEMIKIRAN POLITIK DALAM DRAMA INDONESIA MUTAKHIR

I. B. Putera Manuaba
Dosen Fakultas Sastra Unair

Abstract

This research aims to identify the significance of political thoughts in the contemporary drama Panembahan Reso and Republik Bagong. The dominant political thoughts are: nonviolence and rational politics; politics with open attitude, a white-thought, friendship, and good-attitude; politics that does not sacrifice huma; politics that accumulates useful messages and thoughts, solidarity politics; politics of hero characteristics, and politics oriented to justice and truth. The significance of the political thoughts leads to the creation of politics that prioritizes humanities and nonviolence, good attitude, humanity, and a sense of friendship that become the main foundation of the practice in the political will.

Key words: the drama texts, identity of political thoughts, significance of political thoughts

Sebagai sebuah karya yang dikreasi dari hasil refleksi sastrawan terhadap realitas sosial masyarakat, karya sastra tidak hanya mengekspresikan imajinasi atau fantasi-fantasi subjektif sastrawannya, tetapi juga sarat menggagas pemikiran kebijaksanaan manusia. Dalam hal ini, sastrawan tidak secara spesifik menghadirkan pemikirannya dalam karyanya, melainkan secara spontan, imajinatif, dan reflektif. Dewanto (1996:129) menyatakan bahwa gaya, bentuk, dan isi sastra bukanlah kesengajaan sastrawan, tetapi karena ia memang "terbius" untuk menulis. Pemikiran dalam karya sastranya cenderung mengedepankan orisinalitas,

sehingga menarik dikaji dan dimaknai. Karya sastra drama Indonesia mutakhir, memperlihatkan kecenderungan menarik semacam itu. Lewat teks-teks drama yang diciptakan, sastrawan merepresentasikan berbagai pemikiran, dan secara hipotetik yang dominan di dalamnya adalah pemikiran politik. Pemikiran politik ini secara menonjol dan intens direpresentasikan dalam teks-teks drama Indonesia mutakhir.

Drama *Panembahan Reso* (1988) karya W. S. Rendra dan *Republik Bagong* (2001) karya N. Riantiarno adalah dua drama Indonesia mutakhir yang sarat dengan pemikiran politik sastrawannya. Drama-drama tersebut

bukanlah sekadar karya yang dibuat untuk dipentaskan, tetapi sekaligus merupakan renungan pemikiran politik yang terlahir dari sastrawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap nasib dan masa depan bangsa serta umat manusia. Di dalam kedua teks drama itu, Rendra dan Riantiarno menawarkan alternatif pemikiran politik yang mungkin cocok untuk mengelola negara bangsa (*nation-state*) yang lebih berbudaya, beradab, dan berbudi luhur.

Rendra menciptakan teks drama *Panembahan Reso* sarat dengan pemikiran politik. Karya itu dipengaruhi oleh roh tradisi, sebagai akibar Rendra melakukan penggalan unsur-unsur tradisi luhur. Jejak pujangga Ronggowarsito yang mengungkapkan imej-imej puitis yang bebas dari konvensi simbolisme tradisional tampaknya juga dimanfaatkan secara *apik* oleh Rendra. Rendra tampak berusaha menggali tradisi, namun ia tidak terjebak dalam belenggu tradisi itu sendiri. Di dalam drama ini dapat disimak pengisahan yang mengedepankan "kebebasan berpikir" tokoh-tokohnya dan tidak terjajah oleh simbolisme tradisional dan ikatan-ikatan rasionalisasi. Spirit kepujangaan Ronggowarsito yang sangat menghargai kebebasan, memberi pengaruh pada kedirian Rendra sehingga lewat karyanya ia cenderung melontarkan kritik sosial dan pemikiran politiknya. Lewat pengisahan keluarga kerajaan di negeri antah-berantah, Rendra memunculkan tipologi-tipologi tokoh yang dapat mengekspresikan pemikiran-pemikiran politiknya.

Riantiarno dalam karyanya *Republik Bagong*, juga menyajikan kisah yang sangat kental dengan tawaran pemikiran politik. Lewat gaya pengisahan

yang memadukan nuansa tradisi wayang, secara simbolik Riantiarno cenderung mencipta tokoh-tokoh yang mendialogkan secara kuat tentang politik yang membela nasib rakyat jelata. Drama *Republik Bagong* mengisahkan tentang soal kekuasaan di kerajaan Amarta. Dalam kisah kerajaan ini, terpancar pemikiran-pemikiran politik yang sesungguhnya menjadi hasil refleksi sastrawannya Riantiarno atas realitas politik di lingkungan sosial pada zamannya, namun kemudian diangkat ke tataran yang universal.

Dalam kisah drama *Republik Bagong*, tokoh Bagong –yang disertai jimat "Kalimusada" oleh Kresna yang saat itu berkuasa– tiba-tiba menjadi sakti. Namun, Bagong masih ragu untuk menjadi raja. Bayangan Bagong terus membayangkan-bayangi dan menyuruh agar Bagong tetap mau menjadi raja yang dipilih lewat pemilu. Bagong akhirnya setuju, dan jadilah ia raja Amarta yang menang lewat pemilu. Akhirnya Bagong benar-benar menjadi raja yang dihormati termasuk oleh para Pendawa. Maka itu terbentuklah Republik Bagong yang dipimpin oleh Bagong. Di tengah merebaknya wacana politik yang tampak lebih mengedepankan kepentingan di negeri Indonesia, sastrawan menjadi pihak yang belum pernah didengar dan dipahami pemikiran-pemikiran politiknya. Padahal, kendatipun sastrawan itu bukan ahli politik, namun di dalam karya-karyanya mereka mampu mengembangkan pemikiran politik yang substansial sehingga cukup penting diperhatikan.

Atas dasar itulah maka kedua teks drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong* dikaji mengingat teks-teks drama juga menjadi satu "dokumen" artistik

penting yang sarat dengan pemikiran-pemikiran politik yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Sehubungan dengan hal itu, dua masalah pokok yang dikaji di sini adalah (1) bagaimana cara Rendra dan Riantiarno menyampaikan pemikiran politik dalam drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong?*; (2) bagaimanakah makna pemikiran politik yang direpresentasikan dalam drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong?*

Sebagai sebuah hasil refleksi sastra dengan realitas sosial masyarakatnya, sastra menuangkan segala sesuatu yang diamati dan dialaminya sebagai hasil refleksi dirinya. Oleh karena itulah tidak salah jika Santosa (2000:251) menyatakan bahwa sastra sering dikaitkan dengan masalah kekuasaan, ideologi, dan politik, dan semua itu pada dasarnya merupakan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri merupakan kenyataan sosial (Damono, 1978:1).

Karya sastra merupakan refleksi transformasi pengalaman hidup dan kehidupan manusia, baik secara nyata maupun rekaman semata, yang dipenggal-penggal dan kemudian dirangkai kembali dengan imajinasi, persepsi, dan keahlian sastra yang disajikan melalui media bahasa. Mohammad (1993:7) juga pernah membahas bagaimana sastra dikaitkan dengan politik. Sastra dan politik, sastra dan kekuasaan, mendapat perhatian yang serius dari para pengamat dalam masa Orde Baru, terutama menyangkut kejadian dan keadaan di Indonesia tahun 1960-an. Kajian Goenawan tersebut terbatas pada pembicaraan historis tentang polemik tersebut dan tampaknya belum menyentuh pemikiran-pemikiran politik yang lebih jauh

dan mutakhir.

Eagleton (1998:19-20) memandang karya sastra bersifat ideologis; karya-karya tulisan yang mengandung nilai-nilai dan cita rasa tertentu layak digolongkan sebagai sebuah karya sastra. Ketika ia membicarakan kesusastraan Inggris abad ke-18, kesusastraan dikatakan bertugas tidak lebih hanya "mengandung" nilai sosial tertentu. Kemudian secara lebih jauh Eagleton (1998:27) menyatakan bahwa dalam beberapa hal kesusastraan adalah wahana yang sesuai untuk melaksanakan ideologi ini. Sebagai bidang yang liberal dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, kesusastraan dapat menyediakan suatu penawar mujarab terhadap ahli-ahli politik yang fanatik yang menganut ideologi yang ekstremis.

Dari kajian atau pembahasan sastra tersebut, memang ada satu hal yang menarik yang perlu diketengahkan di sini yakni perihal keberadaan sastra yang tidak tergantikan oleh bidang-bidang lain. Maksudnya, tatkala bidang-bidang lainnya tak mampu memberi jawaban, sastra justru tampil memikat menawarkan alternatif-alternatif baru. Dengan demikian, ketika pemikir politik belum menemukan pemikiran politik yang bijak, sastra hadir dengan gagasan pemikiran politik yang baru. Berdasarkan semua itulah maka penelitian ini akan mencoba mengungkap pemikiran politik sastra dalam teks-teks drama tersebut, dengan menggunakan teori sosiologi sastra, sebagaimana yang dikembangkan oleh Swingewood (1971).

Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan sekaligus memaknakan pemikiran politik dalam drama Indonesia mutakhir yakni *Panembahan Reso* dan *Republik*

Bagong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya pemikiran politik yang telah ada selama ini guna membantu para politikus mengelola negara bangsa (*nation-state*) ini dalam bangunan *civil society* dan masyarakat yang demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian pustaka (*library research*). Objek kajiannya adalah drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong*, dengan fokus kajian adalah pemikiran politik. Data primer ditentukan berdasarkan fokus itu, yang diperkuat oleh data sekunder yang berupa tulisan-tulisan, artikel-artikel, dan resensi-resensi. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode simak. Di sini data disimak secara intens dengan lebih terkonsentrasi pada pemikiran politiknya yang dilihat dari pemikiran tokoh-tokohnya. Dari data yang terkumpul, kemudian di analisis dengan menafaatkan metode analisis wacana (*discourse analysis*). Model analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang lebih menekankan pada teks sebagai data utama dalam melihat pemikiran politik namun masih mempertautkan dengan unsur pengarangnya selaku pencipta teks.

Digunakannya metode analisis wacana, karena metode ini merupakan analisis kritis yang melampaui analisis isi (*content analysis*) dan tidak berorientasi pada model analisis empirik-positivistik, tetapi memandang penting kehadiran subjek penganalisis dalam memproduksi makna (Hikam, 1996:78). Kleden (1997:34) memandang perlunya wacana mengandaikan adanya sastrawan, teks, dan pembaca yang dimediasi oleh bahasa dalam produksi makna.

Analisis wacana dalam bidang sastra sendiri melihat bagaimana korelasi antara teks, pengarang, dan realitas sosial, serta pembaca selaku pemberi makna. Analisis wacana berpegang pada konsep kesatuan (*unity*) dan kepaduan (*coherence*) (Sobur, 2001:10). Dengan demikian, konsentrasi analisis wacana tidak lagi pada pemaknaan pesan-pesan eksplisit, tetapi pada "maksud implisit" di dalam teks. Analisis wacana lebih bekerja dalam tataran yang utuh, yang melibatkan berbagai macam unsur terkait, guna memproduksi makna yang secara menyeluruh pula. Di dalam analisis ini teks dijadikan sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi dan memaknakan pemikiran politik.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemikiran Politik: Relasi antara Pengarang dan Teks



Pemikiran politik yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini tidak diungkapkan secara tersurat oleh Rendra dan Riantiarno dalam *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong*. Dalam menawarkan pemikiran politik mereka cenderung memanfaatkan gaya penceritaan (*style*) dan isinya yang berupa kritik atas kekuasaan yang mengorbankan rakyat kecil.

Dalam drama ini, kedua sastrawan tampak ingin menyatakan pemikiran politik dengan cara lain, yang tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang langsung terjun dalam dunia politik (entah ia adalah ilmuwan politik, pemikir politik, ataupun politikus). Dalam pengertian, cara yang lebih berupa abstraksi-abstraksi pemikiran yang muncul dari realitas empirik menyangkut problem-problem politik.

2. Transformasi Pemikiran Politik dalam *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong*

Pemikiran politik yang menjadi inti pembahasan ini disajikan sastrawan dengan cara yang spesifik dalam kedua drama ini. Dari penyimakan atas kedua teks yang dilakukan, drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong* sama-sama melontarkan pemikiran politiknya melalui gaya ironi, nasihat, dan metafor. Di dalam kedua teks tersebut, sarana-sarana kesastraan tersebut digunakan secara bervariasi, sehingga membuat keduanya menjadi menarik.

Di dalam drama *Panembahan Reso*, gaya ironi digunakan paling dominan digunakan oleh Rendra. Pemikiran politik yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pemikiran tentang politik yang diorientasikan untuk memperbaiki keadaan

penyelenggaraan negara ke arah yang lebih baik, demi mencapai tujuan kebaikan bersama (*public good*). Maka itu, segala bentuk kritik yang dilontarkan dalam karya ini tampak diarahkan untuk mengubah keadaan agar negara tidak terjebak ke dalam kubangan yang menyengsarakan rakyat.

Di dalam *Panembahan Reso* kita bisa mencermati dari berbagai dialog (teks pokok) dan narasi-narasinya. Oleh karena melalui bagian-bagian teks itulah pemikiran politik dilontarkan sastrawannya. Dalam dialog misalnya kita bisa menyimak dari apa yang dilontarkan Panji Tumbal: "*Negara kacau. Rakyat hidup di dalam kemiskinan. Kejahatan merajalela, baik di kalangan rakyat maupun di kalangan pejabat. Inilah saatnya Anda mengambil alih kekuasaan*" (Rendra, 1983:10). Dialog-dialog semacam itu, tersebar mewarnai keseluruhan teks *Panembahan Reso*.

Jika dicermati secara saksama tampaknya bahwa penggambaran kekacauan bukanlah dimaksudkan untuk mendoakan negara agar kacau, tetapi lebih diartikan sebagai bentuk sikap ironi sastrawan tentang keprihatinan sastrawan (dan juga masyarakat) kepada nasib bangsa dan negara yang dikacau oleh kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen kebaikan maka pengelolaan negara pastilah akan kacau-balau. Lewat ironi ini, sastrawan ingin menyatakan bahwa kekuasaan haruslah dipegang oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi pada kebaikan bersama itu tadi. Gaya ironi ini dalam petikan teks yang lainnya juga dapat disimak sebagaimana yang dikatakan Panji

Rebo: "*Darahku bergelora. Aku harus menjadi raja! – Sebelum menyatakan pemberontakannya Panji Tumbal menawarkan tahta yang akan ia rebut kepadaku*" (Rendra, 1983:35). Lewat gaya itu, sesungguhnya Rendra ingin berkata bahwa kekuasaan tidak perlu direbut dengan melakukan pemberontakan (kekerasan) tetapi dengan melakukan tindakan-tindakan yang arif dan bijaksana.

Gaya ironi menjadi kekhasan dari drama ini ketika melontarkan pemikiran politik. Cara menyampaikan sesuatu dengan maksud yang lain itulah yang seperti membuat drama ini menjadi menarik. Dominannya gaya ironi tersebut tampak didukung juga dengan nasihat-nasihat yang berorientasi kepada kebaikan. Dengan perkataan lain, cara menyampaikan pemikiran politik itu, di dalam teks harus didukung dengan "keberanian". Keberanian menjadi semacam "api" guna meraihnya, sebagaimana yang dilontarkan lewat pernyataan Ratu Dara: "*alam mengajarkan kita untuk berani bergulat. Kita harus kuat, karena yang kuat yang akan menetapkan aturan di dalam kehidupan*" (Rendra, 1983:33).

Di dalam drama *Republik Bagong* kita juga melihat Riantiarno banyak melontarkan kritik dengan gaya ironi, seperti di antaranya dapat disimak dari dialog yang dilontarkan Bagong: "*Saksi jujur makan hati melulu. Begitu banyak peristiwa dan suasana membingungkan. Hasilnya tak pernah sesuai dengan yang diharapkan. Dan saksi jujur Cuma jadi korban olok-olok. Saksi zaman sekarang, kita tahu, gampang disogok. Banyak yang sudi bersaksi demi kepentingan tertentu, dengan imbalan tertentu*" (Riantiarno,

2001:14).

Selain gaya ironi, nasihat juga sering digunakan, baik Rendra maupun Riantiarno, dalam melontarkan pemikiran-pemikiran politiknya. Di dalam *Panembahan Reso*, lontaran-lontaran pemikiran itu disampaikan melalui nasihat, sebagaimana yang dapat disimak dalam perkataan yang dilontarkan Raja Tua: "*Karena itu kita harus keras dan tegas terhadap pikiran yang neko-neko. Bukannya aku kejam kepada rakyat, tetapi aku belajar dari pengalaman*" (Rendra, 1983:125). Nasihat-nasihat serupa juga digunakan dalam drama *Republik Bagong*, yang pada dasarnya difungsikan untuk melontarkan pemikiran politik, sebagaimana yang diucapkan Bagong-1: "*Langkah utama kita adalah: buka habis borok-borok penguasa, mereka lebih mementingkan diri sendiri. Ketidakadilan yang sadistis. Begitu tiba waktunya gempur! Dan hanya ada satu tujuan: menang! Atau, mati!*" (Riantiarno, 2001:41).

Sarana kesastraan yang juga dominan digunakan adalah pemakaian metafor. Pemakaian metafor bahkan sudah dimulai sejak Adeg pertama "Terang Bulan", sebagaimana yang dilontarkan Reso: "... . *Aku bermimpi wajah bulan tertikam pedang. Persis di mata kirinya. Darah mengucur, membanjir. Membanjiri istana si Raja Tua.*" (Rendra, 1983:7). Di dalam teks tersebut tampak pengarang memanfaatkan metafor untuk melukiskan betapa politik diwarnai kekerasan. Perebutan kekuasaan dilakukan dengan kekerasan, sehingga menimbulkan banjir darah. Di dalam drama *Republik Bagong* juga sarat dengan pemakaian metafor, sebagaimana muncul dalam narasi-narasinya dan dialog-

dialognya. Dalam narasi awal dikatakan: "*Para satria berebutan kursi, Menginjak kepala dan hatinurani, Menari di atas bangkai-bangkai, Masa depan yang terbelngkai.*" (Riantiarno, 2001:5). Pemakaian metafor digunakan di sana-sini secara variatif dalam keseluruhan teks *Republik Bagong*, membuat karya tersebut terkesan puitis namun kocak.

3. Menyingkap Pemikiran Politik dalam *Panembahan Reso*

Drama *Panembahan Reso* memang merepresentasikan banyak pemikiran politik. Beberapa pemikiran politik tersebut adalah seperti berikut.

Pertama, politik tidak identik dengan kekerasan, tetapi identik dengan pengedepanan penalaran (rasionalitas). Politik yang disertai dengan kekerasan adalah politik yang berjalan di tepi kegagalan, karena arti politik mengalami pergeseran dari arti awalnya yang berarti positif, yakni kebaikan bersama (*publik good*). Untuk mengembalikannya, politik harus diusahakan dengan mengedepankan penalaran yang sehat. Hal ini dapat disimak dari apa yang disampaikan oleh Panji Rebo: "*Jangan salah paham. Saya tidak suka bertindak dengan mata gelap. Semua harus mempunyai penalaran yang teliti.*" (Rendra, 1983:10).

Kedua, politik yang sehat jika dilakukan dengan cara-cara yang terbuka dan kompetitif dan bukan melalui "jalan belakang", sehingga sangat mungkin dapat merugikan sesama yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Panji Reso di dalam teks ini sesungguhnya mencerminkan bentuk pemikiran yang menolak cara-cara yang tidak terbuka dalam meraih kemenangan

politik. Di balik pengungkapan cara-cara yang licik, sesungguhnya Riantiarno ingin mengatakan bahwa pilihlah cara-cara yang baik dalam berpolitik. Dalam teks bisa dibaca dalam dialog yang dilakukan Panji Reso dengan Tumbal: "*Rahasiakan hubungan Anda dengan saya. Rahasiakan semuanya ini. Sebab saya masih ingin main di dalam permainan edan ini.*" (Rendra, 1983:16).

Ketiga, dalam berpolitik harus didukung dengan pikiran yang terang, agar dapat secara bijak mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa. Jika pikiran tidak dalam kondisi terang, niscaya aktivitas politik akan terpengaruh olehnya. Pentingnya pikiran yang terang tersebut dilontarkan Ratu Dara tatkala berdialog dengan Panji Rebo: "*Terangkan dulu pikiranmu. Nanti kalau kamu sudah menjadi raja, kamu bisa menempuh jalan yang kamu kehendaki.*" (Rendra, 1983:33).

Keempat, dalam berpolitik yang harus dikedepankan adalah sikap persahabatan atau kesetiakawanan. Dengan sikap semacam itu kita dapat bekerja sama memikirkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan menyampaikan sikap kesetiaan seorang pembunuh, Rendra menawarkan arti pentingnya persahabatan kepada orang-orang yang terjun dalam kancah perpolitikan. Rendra menyatakan dalam teksnya: "*.... Tidak saya duga: seorang pembunuh bayaran mempunyai kesetiaan yang besar terhadap diri saya.—Saya sangat menghargai persahabatan ini.*" (Rendra, 1983:75).

Kelima, kursi kekuasaan itu sesungguhnya hanya pantas ditempati oleh orang-orang bijak, agar tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemikir, Rendra memang mengakui yang bisa disimak ketika Panji Reso sadar akan arti bermaknanya kursi kekuasaan sebagai tempat yang tidak sembarangan: "*Rupanya tahta memang bukan tempat duduk sembarangan. Orang yang duduk di atas tahta itu menjadi pusat perhatian.*" (Rendra, 1983:171). Kursi kekuasaan adalah kursi dimana orang harus dapat melindungi dan memberi kesejahteraan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Keenam, kekuasaan yang kuatlah yang benar-benar akan mampu menciptakan negara yang kokoh. Jika para penguasa memiliki mentalitas yang lemah maka kehidupan negara pastilah akan terancam, karena segala sesuatu bisa diatur sedemikian rupa. Mengenai hal ini, kita bisa menyimaknya melalui apa yang disampaikan Pangeran Bindi: "*Tentu saja! Sebab kekuasaan yang benar-benar kuatlah yang bisa membuat negara menjadi kukuh*" (Rendra, 1983:1940).

4. Menyingkap Pemikiran Politik dalam Republik Bagong

Menyimak karya *Republik Bagong* karya Riantiarno, dapat dilihat banyak kesamaan pemikiran sebagaimana yang terdapat dalam *Panembahan Reso*. Di dalam *Republik Bagong* ini dijumpai kritik pada kekuasaan dan penggunaan kekerasan. *Republik Bagong* menolak secara tegas kekuasaan yang dilaksanakan tanpa kebijaksanaan.

Ada banyak pemikiran politik yang dapat disimak dan diinterpretasi di dalam *Republik Bagong*. Pertama, politik yang baik manakala tidak mengorbankan orang (rakyat). Politik harus disosisikan sebagai media untuk melindungi rakyat, dan bukan

justro mengorbankan mereka. Politik yang mengorbankan rakyat, apalagi dalam jumlah yang besar, itu bukanlah politik tetapi taktik, kekejaman, dan perbuatan setan. Arti politik harus diterjemahkan ke dalam "manajemen kebaikan", agar orang-orang yang hidup di dalamnya menjadi baik. Hal tersebut dapat disimak pada sikap kekecewaan Bagong dalam dialognya: "*Atau barangkali, ini masih zaman para penguasa yang tega menculik dan membunuh anak-anaknya sendiri, hanya karena anak-anak itu berani bertanya tentang kemiskinan dan ketidakadilan?*" (Riantiarno, 2001:19). Dalam petikan lain kita juga bisa menyimak sebagaimana yang diungkapkan tokoh Kalapati: "*Kalau kita tega membunuh Semar, ya Bagong saja. Ingat isyaratnya, yang tertua atau yang termuda. Kalau tidak dilakukan, seluruh Amarta akan menanggung akibatnya.*" (Riantiarno, 2001:34). Mengorbankan jiwa manusia bukanlah politik yang baik. Namun, semua itu hanyalah kesesatan manusia dalam cara berpikir tentang politik. Secara lebih keras, penolakan Riantiarno atas korban manusia itu dilontarkan lewat percakapan Semar: "*Oo, zaman apa ini? Para satria mendadak jadi makhluk barbar. Tumbal manusia itu Cuma dilakukan oleh para raksasa dan setan-setan.*" (Riantiarno, 2001:60).

Kedua, politik harus dapat mengakomodasi berbagai nasihat dan pemikiran yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas manajemen kebaikan tersebut. Maka, seorang politikus baru akan bisa maju manakala ia mau mendengarkan nasihat-nasihat bijak yang datang dari segala penjuru. Sikap ini secara kental dilukiskan Riantiarno melalui tokoh

Petruk: "*Zaman punakawan sudah finish. Para satria tak butuh nasihat kita lagi. Karena dianggap mengganggu dan cerewet. Mereka juga tidak butuh hiburan cara kita yang katanya sudah ketinggalan zaman.*" (Riantarno, 2001:25). Sikap tertutup terhadap nilai-nilai kebijaksanaan, hanya akan membuat politikus berkaca hanya dari dirinya sendiri saja. Dalam hal ini, yakin pada diri sendiri itu di satu sisi memang penting, tetapi di sisi lain jika *self-confidence* terlalu tinggi maka akan menutup peluang untuk berkembang.

Ketiga, politik seyogianya dilaksanakan dengan bergandengan tangan, karena menang dan kalah bukanlah soal penting dalam berpolitik. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjadikan rakyat lebih sejahtera dan makmur. Kemenangan dalam berpolitik adalah kemenangan dalam mengelola kekuasaan sehingga bermanfaat bagi kebanyakan orang yang hidup dalam suatu organisasi besar yang bernama negara.

Pemikiran tersebut secara tersirat dapat kita simak dalam ucapan Srikandi tatkala berdialog dengan Banowati: "*Kalau perang terjadi, siapa pun pemenangnya, sebaiknya kita tidak terpengaruh. Kita tetap bergandengan tangan, melaksanakan rencana dengan hati teguh. Mengutuk keras arsitek utama, penyebab perang sampai pecah.*" (Riantiarno, 2001:51). Dengan demikian, dalam *Republik Bagong* ini, perang bukan jalan utama dalam menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, perang harus dihindarkan, jika kita ingin berpolitik secara baik dan sehat.

Keempat, politik membutuhkan solidaritas yang dipandu hati dan rasa.

Politik itu bukannya suatu ajang saling menjatuhkan tetapi ajang adu keunggulan, kualitas, dan tawaran-tawaran program demi kebaikan bersama itu tadi. Dalam ajang tersebut—yang pada dasarnya merupakan kompetisi—orang seyogianya mengedepankan kemampuan otak dan bukan otot. Pemikiran politik semacam ini dilontarkan melalui percakapan Petruk: "*Harap dipahami. Pandawa punya solidaritas. Punakawan juga punya. Cuma bedanya, mungkin, solidaritas Pandawa lebih disetir oleh otak dan lemahnya sistem.... Solidaritas para punakawan dipandu oleh hati dan rasa.*" (Riantiarno, 2001:62). Tanpa adanya solidaritas, politik akan berjalan saling menjatuhkan.

Kelima, politik memerlukan orang-orang yang berwatak satria. Politik bukanlah suatu permainan yang hanya bertujuan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kepentingan individu atau kelompok bukanlah yang harus ditonjolkan dalam berpolitik, namun individu-individu yang terlibat dalam kancah politik harus sadar betul bahwa berlaku sebagai seorang satria merupakan suatu keharusan bagi politikus. Seorang satria haruslah bisa memegang janji dan sumpahnya sebagai orang-orang yang menentukan nasib rakyat. Hal ini pulalah yang tampak ditekankan Riantiarno dalam drama ini, sebagaimana yang dilontarkan melalui tokoh Yudhistira: "*Satria harus pegang janji. Ingkar janji bukan watak satria.*" (Riantiarno, 2001:107).

Keenam, politik haruslah berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Segala bentuk rekayasa politik yang bertujuan untuk kemenangan diri sendiri dan mengorbankan rakyat banyak dapat

dipandang sebagai politik yang pincang dan tidak berdaya. Oleh karena itu, demi mempertahankan kebenaran dan keadilan, maka setiap orang harus mau duduk bersama demi masa depan bangsa dan negara. Pemikiran politik tentang hal ini dilontarkan Riantiarno lewat ucapan yang sarat kritik pada tokoh Semar: "*Bandit dan orang suci duduk bersama, mendiskusikan masa depan. Janji setan-setan dan satria sama bobotnya. Semua bersumpah demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan sama rata. Banyak satria dan seakan rela mendermakan harta bendanya demi negara demi rakyat, padahal Cuma demi dirinya. Itulah zaman Bagong.*"(Riantiarno, 2001:138).

5. Makna Pemikiran Politik dalam Panembahan Reso dan Republik Bagong

Dari identifikasi atas berbagai pemikiran politik dalam teks *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong*, kita dapat memaknakannya seperti berikut:

Politik itu sesungguhnya perlu dimaknakan secara benar agar aktivitas politik sesuai dengan visi awal dicetuskannya konsep "politik". Orang berpolitik itu bukan justru membuat orang (terutama rakyat tambah menderita) tetapi politik itu dipergunakan sebagai wahana penting untuk mengelola bangsa dan negara agar orang-orang yang hidup di dalam bangunan bangsa dan negara itu memperoleh perlindungan yang baik dan jadi sejahtera. Manusia, sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya terjamin keamanan dan memiliki kebebasan dalam mengembangkan atau mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi-potensinya. Bukankah tujuan dibentuknya negara

adalah agar rakyat memperoleh jaminan-jaminan semacam itu? Oleh karena itulah maka pengelolaan negara haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi. Orang yang terjun ke dunia politik seharusnya juga memiliki sikap terbuka dan kompetitif, guna meningkatkan kualitas dirinya selaku orang-orang terpilih yang memiliki kesempatan untuk mengatur negara-bangsa ini. Sikap terbuka dan kompetitif itu berarti juga bersedia menerima kebaikan apa saja dan berani bersaing secara sehat. Persaingan yang sehat, dengan sendirinya, akan memicu orang-orang yang saling berkompetisi menduduki kekuasaan dengan jalan-jalan profesional dan intelektual.

Oleh karena politik itu kita artikan sebagai aktivitas yang sangat positif jika merujuk pada kepentingan bersama, maka pada gilirannya, politik membutuhkan pikiran yang terang dan jernih. Segala pikiran yang gelap, yang menjadi kendala pengembangan kualitas diri, seyogianya dapat dikikis dengan penuh kesadaran. Hanya dengan pikiran yang terang dan jernih itulah orang akan mampu berbuat dan bertindak secara benar dan adil. Kemudian, jika selama ini, politik selalu diidentikkan dengan sikap saling sikut atau bersaing secara tidak sehat maka kini seyogianya pikiran politik semacam itu dapat dihapus dan perlu diganti dengan sikap persahabatan dan kesetiakawanan. Dalam perkataan lain, bolehlah orang berbeda pendapat, pemikiran, persepsi, ideologi, dan seterusnya namun yang terpenting adalah kekuasaan jangan sampai menghancurkan tali persaudaraan di antara kita.

Untuk itulah maka dalam politik itu yang dibutuhkan adalah orang-orang bijak.

Orang-orang yang mampu melakukan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan; bukan sebaliknya, merugikan manusia apalagi sampai sengaja mengorbankan manusia. Orang-orang (rakyat) janganlah dijadikan tumbal dalam meraih kekuasaan karena tumbal biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan kemanusiaannya sebagai manusia. Dengan memposisikan makin banyak orang bijak di dalam dunia politik, niscaya akan tercipta kekuasaan yang kuat dan kokoh yang mampu membuat bangsa dan negara memiliki daya tahan yang handal dan tidak tergoyahkan. Namun, jika orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan adalah orang-orang yang berjiwa lemah dan mudah diasut maka kekuasaan akan menjadi sangat lemah. Implikasi lebih jauhnya, negara dan bangsa akan menjadi lemah juga.

Atas dasar itu, jika seseorang berkomitmen terjun ke dunia politik maka seharusnya ia berkomitmen juga pada cita-cita luhur untuk merebut kekuasaan yang nantinya kekuasaan diejawantahkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan bersama. Apa yang diperjuangkan oleh orang berikhtiar meraih kekuasaan seharusnya bermakna sebagai kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai penguasa yang bijak. Dengan demikian, jiwa pengabdian, semangat kemanusiaan, sikap tanpa pamrih, dan sikap siap mengoptimalkan unsur-unsur kebaikan dalam diri, menjadi landasan utama untuk bergerak dalam aktivitas politik.

Sikap tersebut secara terus-menerus perlu dipupuk dengan kesediaan mengakomodasi segala bentuk nasihat dan pikiran baik guna lebih meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik. Maka itu,

politik yang diacu oleh orang-orang yang demikian adalah politik yang berkemanusiaan. Pada kondisi itu pula mereka harus mampu saling bergandengan tangan, membangun solidaritas, menciptakan watak satria, dan senantiasa berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Pada konstelasi tersebut negara bukan hanya diciptakan sebagai simbol semata, tetapi sebagai wadah yang harus diwujudkan, "dibumikan", dan difungsikan sedemikian rupa demi kepentingan seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat itulah yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai tujuan paripurna dari aktivitas politik.

Pemikiran-pemikiran politik dan makna pemikiran politik itu menjadi satu hal penting yang patut diperhatikan oleh orang-orang yang terjun ke dunia politik agar dirinya dapat tampil sebagai politikus-politikus yang bervisi kemanusiaan dan benar-benar menjunjung kejayaan bangsa dan negara.

Simpulan

Pemikiran politik merupakan satu pemikiran dominan yang disampaikan dalam drama Indonesia mutakhir terutama pada teks drama *Panembahan Reso* dan *Republik Bagong*. Pemikiran politik itu disajikan melalui gaya ironi, pemberian nasihat, dan pelukisan metafor. Pemikiran politik yang berhasil diidentifikasi semuanya mengacu pada kebaikan bersama (*public good*). Hanya saja pemikiran-pemikiran politik itu direpresentasikan dengan cara penyajian yang bervariasi. Berbagai pemikiran politik tersebut memiliki makna yang penting terutama bagi politikus agar dapat makin meningkatkan kualitas dirinya selaku pihak

yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan nasib rakyat.

Pemikiran politik yang paling dominan dan paling penting dikemukakan kembali sebagai sebuah pemikiran di sini adalah perlunya politik mengembangkan sikap antikekerasan dan rasionalitas. Di samping itu juga perlu menciptakan sikap kesetiakawanan (persahabatan) dalam berpolitik. Aktivitas politik sebaiknya

dilakukan oleh orang-orang yang bijak dan memiliki dedikasi tinggi pada bangsa dan negara serta bersikap satria. Politik juga bermakna sebagai aktivitas penting yang pada akhirnya bertujuan untuk meraih keadilan dan kebenaran. Politik mengandung makna sebagai aktivitas yang seharusnya didasari atas sikap-sikap kebajikan dan mulia agar dalam aktivitas politik rakyat banyak tidak dikorbankan.

Daftar Pustaka

- Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1983).
Damono, Sapardi Djoko. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978).
Dewanto, Nirwan. *Senjakala Kebudayaan*. (Yogyakarta: Bentang, 1996).
Eagleton, Terry. *Teori Kesusastraan: Suatu Pengenalan*. (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988).
Hikam, A.S. "Bahasa dan Politik: Penghampiran *Discursive Practice*" dalam *Bahasa dan Kekuasaan*. (Bandung: Mizan, 1996).
Kleden, Leo. "Teks, Cerita dan Transformasi Kreatif" dalam *Jurnal Kebudayaan Kalam* 10, 1997.
Mohammad, Goenawan. *Kesusastraan dan Kekuasaan*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1983).
Rendra, W. S. *Panembahan Reso*. (Jakarta: Pustaka Karya Grafika Utama, 1988).
Riantiarno, N. *Republik Bagong*. (Yogyakarta: Galang Press, 2001).
Santosa, Puji. "Kekuasaan, Ideologi, dan Politik dalam Kesusastraan", dalam *Sastra: Ideologi, Politik, dan Kekuasaan*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000).
Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Rosdakarya, 2001).
Swingewood, Alan and Diana Laurenson. *Sociology of Literature*. (England: Paladin, 1971).